

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA PIHAK KETIGA

Drg. Afina Hasnasari Heningtyas, MPH

CAPAIAN PEMBELAJAR AN:

“Mampu bekerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk menunjang peningkatan kesehatan gigi dan mulut.”

Perjanjian Kerja Sama:

- Suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.
- Suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat suatu hal yang khusus (*Black's Law Dictionary*)

PENGERTIAN

PERJANJIAN KERJA SAMA

Kontrak (landasan hubungan kerja sama) antara pemberi pelayanan kesehatan (PPK) dengan lembaga asuransi kesehatan (Bapel)

TUJUAN

Tersedianya jaringan provider/penyedia layanan kesehatan yang berkualitas dan efektif

Sebagai pengendalian biaya

Untuk kenyamanan dan kepuasan peserta

MENGAPA DIPERLUKAN PERJANJIAN KERJA SAMA?

Pemenuhan regulasi

Menjamin tersedianya
pelayanan

Dasar pengendalian
biaya dan utilisasi
pelayanan

Mengurangi
kesalahpahaman dan
tanggung jawab
hukum (proteksi
hukum)

PROSES PERJANJIAN KERJA SAMA DENGAN PPK

Seleksi dan kredensialing

```
graph TD; A[Seleksi dan kredensialing] --> B[Kontrak/perjanjian kerja sama]; B --> C[Pemantauan kualitas]; C --> D[Rekredensialing dan perpanjangan kontrak];
```

Kontrak/perjanjian kerja sama

Pemantauan kualitas

Rekredensialing dan perpanjangan kontrak

KREDENSIALING: TINJAUAN UNTUK KUALIFIKASI PPK

Ijin praktek

Verifikasi Lisensi → bagi tenaga medis

Sertifikasi dewan kedokteran → sertifikat kompetensi

Sifat dan cakupan privileg klinik → kewenangan yang diberikan kepada dokter/drg oleh pemerintah untuk memberikan perawatan

Afiliasi dengan fakultas kedokteran → memperkuat kredibilitas

Riwayat kedisiplinan dan klaim tanggung jawab profesi → tinjauan oleh dewan kedokteran (komisi etik/komisi disiplin)

Catatan kriminal (jika ada)

Paket asuransi malpraktek/profesi yang diambil

Profil Praktek

PERSYARATAN KREDENSIALING

FKTP

- Surat ijin operasional
- SIP /SIPA/SIK bagi tenaga medis
- Perjanjian kerja sama dengan jejaring
- Sertifikat akreditasi

FKTL

- Surat ijin operasional
- SIP /SIPA/SIK bagi tenaga medis
- Surat penetapan kelas RS
- Perjanjian kerja sama dengan jejaring
- Sertifikat akreditasi

KREDENSIALING

Prasarana:

- Ukuran ruang minimal 3,5 x 3,5 m
- Ventilasi, penerangan/pencahayaan yang cukup
- Tempat penyimpanan rekam medis
- Tersedia air mengalir, listrik, wastafel, pengolahan limbah dan sanitasi yang baik
- Ruang tunggu, toilet, tempat parkir
- Dental kabinet

KREDENSIALING

Sarana:

- Media promotif
- Dental unit lengkap
- Sterilisasi
- Peralatan alat pembersihan karang gigi
- Alat diagnostik minimal 10 set
- Peralatan penambalan
- Peralatan pencabutan
- Peralatan bedah mulut sederhana
- Tensimeter dan stetoskop

REKREDENSIALING

Dilakukan secara reguler → BPJS per 1 tahun sekali.

Terdiri dari:

- Kunjungan Bapel untuk mengecek terpenuhinya persyaratan kontrak pada provider (fasilitas)
- Tinjauan laporan keuangan
- Tinjauan terkait pengaduan pelayanan
- Analisis survey peserta
- Inspeksi mendadak: Ketersediaan PPK dan waktu pelayanan

**KONTRAK
TIDAK
TERPENUHI:**

Sanksi tidak
bisa menambah
peserta

Rekredensialing
berulang

Kerja sama
berakhir

CONTOH KASUS



Berdasarkan surat Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/Menkes/18/2019 tentang Perpanjangan Kerja Sama Rumah Sakit dengan BPJS 4 Januari 2019

Daftar rumah sakit yang tidak diperpanjang kontrak kerja sama dengan BPJS Kesehatan



Tidak memenuhi syarat rekredensialing*

- **RSU Kambang** (Jambi)
- **RS Royal Prima** (Jambi)
- **RS Mayang Medical Center** (Jambi)
- **RS Bersaudara** (Muara Bungo)
- **RS Karya Medika 2 Tambun** (Bekasi)
- **RS Mandaya** (Karawang)
- **RS Multazam Medika** (Cikarang)
- **Klinik Utama Pertamina Pendopo** (Prabumulih)
- **RS Amanah Mahmuda** (Tegal)
- **RS Bhakti Kasih** (Polewali)
- **RS Islam** (Ternate)
- **RSKC Abadi Naob** (Denpasar)
- **RS Bunda Dalima** (Tangerang)
- **RS Ariya Sentra Medika** (Tangerang)
- **RS Mitra Medika** (Cikarang)

*Persyaratan yang harus dipenuhi

1. Surat Izin Operasional
2. Surat Penetapan Kelas RUMAH SAKIT
3. Surat Ijin Praktik (SIP) tenaga kesehatan yang berpraktik
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan
5. Perjanjian kerja sama dengan jejaring, jika diperlukan
6. Sertifikat akreditasi
7. Surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang terkait dengan JKN



Indonesia
baik.id



IndonesiaBaik.id



IndonesiaBaik.id



IndonesiaBaikID



@IndonesiaBaikid

CONTOH KASUS

Home • Finansial • Asuransi

Kontrak Kerja sama BPJS Kesehatan dengan 92 RS Diputus, Peserta JKN Paling Dirugikan

Pemutusan kerja sama antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan rumah sakit swasta akan berdampak pada penurunan pelayan kesehatan terhadap peserta Jaminan Kesehatan Nasional.



Leo Dwi Jatmiko - Bisnis.com

06 Januari 2019 | 22:24 WIB

HOME

NEWS ▾

VIEWS ▾

FOTO

VIDEO

INFOGRAFIS

WEEKEND

SEPAK BOLA

HIBURAN

OTOM

Rabu 12 Juni 2019, 16:20 WIB

19 Rumah Sakit Terancam Putus Kontrak dengan BPJS Kesehatan

Indriyani Astuti | Humaniora

ISI PERJANJIAN KERJA SAMA

Pelayanan

Pelayanan kesehatan wajib
Prosedur
Pelayanan yang tidak
dijamin

Tanggung jawab Bapel

Administrasi
Laporan kunjungan
Paket pelayanan
Pelayanan non medis
Akses terhadap pelayanan
Harga paket jaminan

Program pengendalian mutu

Kompensasi provider
Program kepuasan peserta
Jangka waktu dan
pemutusan kontrak
Identifikasi dan
penyelesaian perselisihan

TANGGUNG JAWAB PPK YANG HARUS TERCANTUM DALAM PKS

Jumlah jam pelayanan per minggu

Pelayanan gawat darurat

Kewajiban partisipasi PPK dalam kendali mutu dan kendali biaya

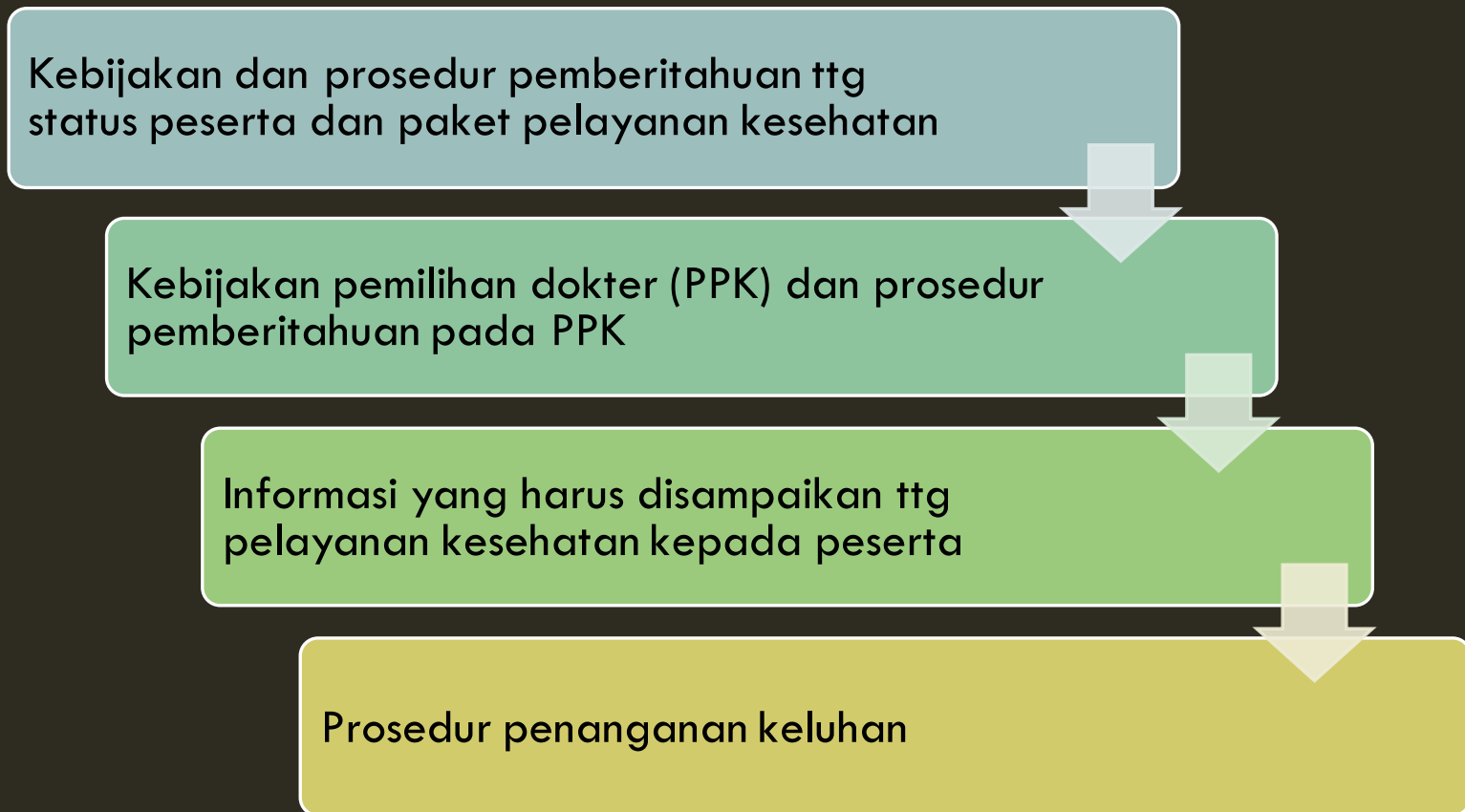
Kewajiban PPK dalam kegiatan pendidikan berkelanjutan

Tanggung jawab untuk pemenuhan standar alat bahan

Kerahasiaan informasi medis

Tanggung jawab untuk membagi informasi dgn tenaga medis lain

ALUR INFORMASI PPK-BAPEL YANG TERCANTUM DALAM PKS



KOMPENSASI/PEMBAYARAN YANG TERCANTUM DALAM PKS

Rincian jenis pelayanan
yang diterima

Kesediaan PPK menerima kompensasi yang
ditetapkan sesuai dengan jenis pelayanan

Kesediaan PPK untuk tidak menarik biaya tambahan pada pelayanan yang disepakati,
meskipun dalam kondisi rugi → Klausul harmless: tidak mengorbankan peserta

Mencantumkan jumlah maksimal per pelayanan atau
kapitasi yang dibayarkan serta prosedur pembayaran

Proses klaim dan
pembayaran klaim

Tata cara
rujukan

HAL LAIN YANG HARUS TERCANTUM DALAM PKS

Sifat kontrak antara dokter dengan PPK (pegawai atau praktisi independen)

Tanggung jawab Bapel dalam asuransi profesi atau malpraktek

Menjelaskan proses pemutusan kontrak, prosedur, dan denda

Menjamin bahwa pelayanan yang diberikan kualitasnya sama antara peserta dengan non-peserta

PERJANJIAN KERJA SAMA

Apa itu PKS?

Mengapa harus ada?

Berupa apa?

Apa isi/materinya?

Siapa yang melakukan?

CONTOH PERJANJIAN KERJA SAMA

[C:\Users\ASUS\Downloads\perjanjian-kerjasama-pks-puskesmas-dan-bpjs_compress\(1\).pdf](#)

TERIMA KASIH